



Pemkab Sekadau Ukir Sejarah Raih WTP

Aloysius : Prestasi Ini Harus Dipertahankan

Borneo Tribune, Sekadau
Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Aloysius, berharap prestasi WTP yang diraih Pemkab Sekadau harus dipertahankan ditahun berikutnya. "Kita berharap prestasi WTP yang diperoleh Pemkab Kabupaten sekadau agar bisa dipertahankan, sehingga tahun 2013 nanti Pemkab Sekadau mendapat rapot penilaian WTP kembali, ini yang kita harapkan," kata Aloysius, Sabtu (14/9).

Aloy mengatakan hasil opini WTP atas hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Sekadau tahun anggaran 2012 adalah kerjakeras lembaga eksekutif dan legislatif. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini ingin agar lembaga Pemerintah terus mempertahankan kerja yang baik, dan professional.

"Saya juga ingatkan kepada semua jajaran Pemkab Sekadau agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, bekerja dengan jujur dan mengedepankan akuntabilitas dan profesionalisme," ujar Aloy.

Keterlibatan lembaga legislatif dalam pengawasan penggunaan keuangan Negara, lanjut Aloy, bagian dari penyelenggaraan Pemerintah di Daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, pihaknya lebih mengutamakan komunikasi agar penggunaan keuangan Negara yang dilaksanakan aparat Pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Tentunya dengan komunikasi yang baik antar lembaga

Pemerintah Kabupaten Sekadau mengukir sejarah karena telah berhasil mengelola keuangan Daerah lebih baik. Hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Sekadau tahun 2012, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Pemkab Sekadau meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

eksekutif dan legislatif penggunaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan baik pula, tentu dengan mengedepankan rencana pembangunan yang mendesak," timpalnya.

Untuk diketahui Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Sedangkan istilah Wajar dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo menjelaskan bahwa pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini merupakan rapor dari pengelolaan keuangan daerah khususnya laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau. Meski begitu, BPK mengatakan predikat tersebut bukan sebuah 'hadiah', melainkan hasil dari kerja keras Pemkab dan DPRD Sekadau dalam mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan Negara.

BPK Kalbar mengharapkan Pemkab Sekadau mampu mempertahankan predikat yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan Negara tersebut pada tahun-tahun berikutnya. "Biasanya mempertahankan predikat ini sulit. Maka kami berpesan peranan inspektorat harus diperkuat. Kunci untuk mendapatkan predikat WTP adalah komitmen kepala daerah dan DPRD," jelasnya. (Mto).



Aloysius, SH, M. Si.

FOTO Bagus Kostanto/Borneo Tribune